

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Stice and Skousen (2004:8) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Accounting is a service activity. its a function is to provide quantitative information, primarily financial in nature about economic decision in making reasonable choice among alternatives course of action”.

Menurut Lili M Sadeli (2010:2) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Menyatakan akuntansi sebagai suatu metodologi dan himpunan pengetahuan yang berkenaan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi apa pun bentuknya yang terbagi atas dua bagian. Pertama, akuntansi ialah pengetahuan yang menyangkut proses pelaksanaan pembukuan dalam arti yang luas. Kedua, auditing ialah pengetahuan yang menyangkut pemeriksaan dan penilaian (evaluasi) atas hasil proses pelaksanaan pembukuan tersebut”.

Menurut Samryn (2011:3) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat dan menafsirkan,

mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis”.

Menurut Harahap (2011:5) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang dan modal dari suatu bisnis”.

Menurut Rudianto (2012:15) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan serta kejadian-kejadian ekonomi untuk dilakukan penilaian dan keputusan yang tepat, jelas dan tegas bagi pemakai informasi tersebut.

2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Akuntansi

Adapun tujuan dan fungsi akuntansi menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:3) yaitu sebagai berikut:

“akuntansi mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi atau perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak di dalam perusahaan maupun pihak di luar perusahaan, dan fungsi akuntansi adalah untuk menghitung laba yang dicapai perusahaan kemudian menilai apakah pimpinan perusahaan telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan oleh para

pemilik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban perusahaan khususnya dari segi keuangan”.

Berdasarkan tujuan dan fungsi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi yaitu untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan suatu bisnis. Sedangkan fungsi akuntansi yaitu untuk merekam catatan transaksi yang bersifat kronologis dan sistematis, menginformasikan catatan transaksi dan hasil transaksi dengan metode komunikasi yang tepat ke pihak yang berkepentingan. Sekaligus menjaga keamanan informasi tersebut.

2.1.1.3 Jenis-jenis Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) adapun jenis-jenis bidang akuntansi berdasarkan tujuannya, antara lain:

1. “Akuntansi Manajemen (*Managemen Accounting*)
Yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.
2. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya actual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.

4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor independen atau akuntantan publik.
5. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
6. Sistem akuntansi (*Accounting System*)
Yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. Akuntansi anggaran (*Budgeting*)
Yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
8. Akuntansi internasional (*Accounting International*)
Yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
9. Akuntansi sektor publik (*public sector accounting*)
Yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya”.

Jenis- jenis dari bidang akuntansi dibagi menjadi sembilan macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.2 Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Siti Resmi (2003:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut P.J.A. Andiani dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:6) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan

untuk pembiayaan dan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan bertujuan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar dapat memakmurkan rakyat.

2.1.2.2 Ciri-ciri Pajak

Berdasarkan Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. “Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara
Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).
2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara
Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak

sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung
Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.
4. Berdasarkan Undang-undang
Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.”

Menurut Mohammad Zain (2005:12) menyebutkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. “Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).”

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber dari pendapatan negara yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar dapat memakmurkan rakyat serta sebagai sumber dari pengeluaran yang dibutuhkan oleh negara.

Menurut Waluyo (2011:6) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak berdasarkan penerimaan yaitu sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, sedangkan fungsi pajak berdasarkan mengatur yaitu sebagai alat dalam mengambil suatu kebijakan di bidang social dan ekonomi.

2.1.2.4 Jenis-jenis Pajak

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:7), pajak dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan sifat, sasaran/objeknya dan lembaga pemungutnya, antara lain:

1. “Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
 - b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak menurut sifatnya yaitu beban pajak tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan, menurut sasaran/objeknya yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, sedangkan menurut

pemungutnya yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.1.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16)

sebagai berikut:

1. “Asas Tempat Tinggal
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.
2. Asas Kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
3. Asas Sumber
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asas dibagi menjadi tiga. Berdasarkan asas tempat tinggal yaitu Indonesia mempunyai hak memungut penghasilan setiap warganya yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, asas kebangsaan yaitu kewajiban membayar pajak diberlakukan juga kepada setiap orang asing yang tinggal di Indonesia, dan asas sumber yaitu hak dari memungut pajak sesuai dengan sumber penghasilan pada negara yang memungut pajak .

2.1.2.6 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang cara pemungutan Pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut:

1. “Stelsel nyata (rill stelsel)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2. Stelsel anggapan (fictive stelsel)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga. Berdasarkan dengan cara stelsel nyata (rill stelsel) yaitu pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, stelsel anggapan (fictive stelsel) yaitu penaan pajak yang didasari oleh suatu anggapan berdasarkan undang- undang, dan stelsel campuran yaitu merupakan dari keduanya secara kombinasi.

2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1. “Sistem Official Assessment
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem Self Assessment
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Sistem Withholding
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga. Yang pertama sistem official assessment yaitu menyerahkan wewenang pemungutan pajak kepada pemerintah, kedua sistem self assessment yaitu menyerahkan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawabnya dalam hal pemungutan pajak kepada wajib pajak, dan yang ketiga sistem withholding yaitu menyerahkan wewenang pemungutan pajak kepada pihak ketiga.

2.1.3 Akuntansi Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Edy Supriyanto (2011:2) pengertian akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pencatatan, pengelolaan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan di akhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.”

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2013:10) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”

Secara umum akuntansi perpajakan (Tax Accounting) adalah suatu seni mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak guna sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

2.1.3.2 Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip yang terdapat dalam akuntansi pajak menurut Djoko Muljono (2011:2-3) adalah sebagai berikut:

1. “Kesatuan Akuntansi

Prinsip kesatuan akuntansi yang juga dianut dalam akuntansi pajak meliputi ketentuan seperti berikut:

- a. Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak- pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.
- b. Ada pemisah yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang-piutang, penerimaan dan pengeluaranuang; antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik/pemegang saham tidak boleh bercampur.

2. Kestinambungan

Prinsip kestinambungan mengandung arti bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan.

3. Harga Pertukaran Obyektif

Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Obyektif berarti sebagai berikut: (a) tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa, (b) dapat diuji oleh pihak independen, (c) tidak terdapat transfer pricing, (d) tidak ada mark-up, tidak ada KKN, dan sebagainya.

4. Konsistensi

Prinsip ini mengatakan bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah-ubah. Misalkan: (a) penentuan tahun buku, (b) perhitungan penyusutan, (c) perhitungan persediaan, (d) pengakuan nilai kurs valuta asing”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak memiliki beberapa prinsip diantaranya kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran obyektif, dan konsistensi.

2.1.3.3 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak menurut Djoko Muljono (2011:5-7) adalah sebagai berikut:

“Fungsi akuntansi adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. oleh sebab itu maka akuntansi harus memenuhi tujuan kualitatif . Adapun fungsi akuntansi perpajakan adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan kualitatif akuntansi perpajakan antara lain sebagai berikut

1. Relevan
2. Dapat dimengerti
3. Daya uji
4. Netral
5. Tepat waktu
6. Daya banding
7. Lengkap”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari akuntansi pajak merupakan proses dari mengolah data kuantitatif yang akan menghasilkan laporan keuangan dan melakukan perhitungan perpajakan, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

2.1.4 Beban Pajak Tangguhan

2.1.4.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan

Menurut Harnanto (2011:115) pengertian beban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).”

Menurut PSAK No. 46 dalam Waluyo (2012:272) beban pajak, yaitu:

“Beban pajak (*tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan.”

Menurut Waluyo (2012:273) pajak tangguhan, yaitu:

“Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.”

Menurut Harnanto (2013:115), beban pajak tangguhan dapat diartikan :

“Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”

Menurut Scott dalam Yulianti (2004) Beban Pajak Tangguhan adalah:

“Beban Pajak Tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).”

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:219) menyatakan apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar dari pada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar dari pada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil dari pada akuntansi fiskal.

Berdasarkan pengertian beban pajak tangguhan di atas, dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar dari pada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil dari pada akuntansi fiskal.

2.1.4.1 Penghitungan Beban Pajak Tangguhan

Menurut Harnanto (2013:115), perbedaan antara laporan keuangan, standar akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi dibandingkan yang diperoleh menurut pajak.

Penghitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total aset. Hal ini dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan dengan total aset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proporsional. Berdasarkan referensi dari penelitian yang dilakukan oleh Phillips et al. (2003) dalam Yulianti (2004) menyatakan bahwa rumusan besaran *deferred tax expense* dinyatakan dengan besaran beban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{BBPT}_{it} = \frac{DTE_{it}}{TA_{i\ t-1}}$$

Keterangan:

$BBPT_{it}$ = Besaran Beban Pajak Tangguhan perusahaan i pada tahun t

DTE_{it} = Beban pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t

$TA_{i\ t-1}$ = Total assets perusahaan i pada tahun t-1

Penggunaan total asset disebabkan beban pajak tangguhan terjadi karena adanya perbedaan temporer sehingga biaya dan penghasilan tahun lalu yang baru diakui pada tahun ini. Adapun indikator yang dapat digunakan dalam penghitungan beban pajak tangguhan, yaitu dengan menggunakan nilai beban pajak tangguhan yang ada pada laporan keuangan laba rugi perusahaan.

2.1.5 Manajemen Laba

2.1.5.1 Pengertian Manajemen Laba

Laba merupakan salah satu informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan dan penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi target rekayasa melalui

tindakan oportunistik manajemen untuk memaksimumkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunistik tersebut dilakukan dengan

cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur sesuai dengan keinginannya, perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba.

Praktek manajemen laba dapat dipandang dua perspektif yang berbeda yaitu sebagai tindakan yang salah (negatif) dan tindakan yang seharusnya dilakukan manajemen (positif). Manajemen laba dikatakan (negatif) jika dilihat sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompesasi, kontrak utang dan *political cost*, sedangkan manajemen laba disebut (positif) jika dilihat dari perspektif *efficient earnings management* dimana manajemen laba memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Menurut Scott (2006:344) manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Given that managers can choose accounting policies from a set (for example, GAAP), it is natural to expect that they will choose policies so as to maximize their own utility and/or the market value of the firm.”

Menurut Sri Sulistyanto (2008:6), Manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk

mengelabuistakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan “.

Menurut Islahuzzaman (2012:257) pengertian manajemen laba adalah sebagai berikut :

“Proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi.”

Menurut Sri Sulistyanto (2012:49), Manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses).”

Menurut Irham Fahmi (2013:279) manajemen laba adalah sebagai berikut :

“*Earnings managemen* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*).Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya”.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dilakukan secara sengaja, dalam batasan untuk mengarah pada suatu tingkat laba yang diinginkan. Tindakan ini merupakan tindakan manajer untuk meratakan, meningkatkan dan mengurangi laba yang dilaporkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh manajemen perusahaan yang bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan dan penurunan profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut. Hal tersebut tentu merugikan

bagi pihak stakeholder sebagai dasar dalam pengambilan keputusan karena informasi laba yang dihasilkan tidak menyatakan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

2.1.5.2 Teknik Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:33-36), ada beberapa cara yang dipakai perusahaan untuk mempermainkan besar kecilnya laba yaitu:

1. “mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih, upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapatan periode berjalan (current revenue). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar dari pada laba sesungguhnya.
2. Mengakui pendapatan lebih lambat satu periode atau lebih, upaya ini dilakukan mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode sebelumnya. Pendapatan periode berjalan menjadi lebih kecil dari pada periode pendapatan sesungguhnya. Semakin kecil pendapatan akan membuat laba periode berjalan juga akan menjadi semakin kecil dari pada periode sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau lebih kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan investor untuk menjual sahamnya (management layout), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.
3. Mencatat pendapatan palsu, upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapanpun. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar dari laba sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor agar membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik.
4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat, upaya ini dapat dilakukan manajer mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (current lost). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar dari yang sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor untuk menjual sahamnya (management

bayout), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.

5. Mengakui dan mencatat biaya lebih lambat, upaya ini dapat dilakukan dengan mengakui biaya periode berjalan menjadi biaya periode sebelumnya. Hingga biaya periode berjalan menjadi lebih kecil dari yang sesungguhnya. Upaya ini dilakukan untuk mempengaruhi investor untuk membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik.
6. Tidak mengungkapkan semua kewajiban, upaya ini dapat dilakukan perusahaan dengan menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil dari pada kewajiban sesungguhnya. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor agar mau membeli saham yang ditawarkannya, menghindari kebijakan multi papan, dan sebagainya”.

2.1.5.3 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:63), beberapa motivasi dalam manajemen laba yang dapat memicu manajer melakukan manajemen laba diantaranya sebagai berikut:

1. ”Bonus Scheme Hypothesis
Kompensasi (Bonus) yang didasarkan pada besarnya laba yang dilaporkan akan memotivasi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan demi memaksimalkan bonus mereka. Bonus minimal hanya akan dibagikan jika laba mencapai target laba minimal tertentu dan bonus maksimal dibagikan jika laba mencapai nilai tertentu atau lebih besar.
2. Contracting Incentive
Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan pinjaman hutang yang berisikan perjanjian untuk melindungi kreditor dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan kreditor, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja, atau laporan ekuitas berada dibawah tingkat yang ditetapkan, yang semuanya dapat meningkatkan risiko bagi kreditor, Karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi sehingga manajer perusahaan berharap untuk menghindarinya. Jadi manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian dalam kontrak hutang.
3. Political Motivation
Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangilaba yang

dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4. Taxation Motivation
Perpajakan merupakan motivasi perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak.
5. Incentive Chief Executive Officer (CEO)
CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
6. Initial Public Offering (IPO)
Perusahaan yang akan go publik belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go publik melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan”.

2.1.5.4 Model- model Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:117), ada beberapa bentuk dari manajemen laba adalah sebagai berikut:

1. “Taking a bath
Dalam bentuk jika manajemen harus melaporkan kerugian, maka manajemen akan melaporkan dalam jumlah besar. Dengan tindakan ini manajemen berharap dapat meningkatkan laba yang akan datang dan kesalahan kerugian piutang perusahaan dapat dilimpahkan ke manajemen lama, jika terjadi pergantian manajer.
2. Income minimization
(menurunkan laba) Upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya.
3. Income maximization
(meningkatkan laba) Dilakukan pada saat laba menurun dengan cara memindahkan beban ke masa mendatang. Tindakan atas income maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.
4. Income smoothing

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil”.

2.1.5.5 Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management*. Menurut Ilham Fahmi (2013:279) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management* (manajemen laba) yaitu:

1. “Standar akuntansi keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi.
3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan.”

Faktor lain timbulnya manajemen laba adalah hubungan yang bersifat asimetris informasi yang pada awalnya didasarkan karena *conflict of interest* antara *agent* dan *parsial*. *Agent* adalah manajemen perusahaan (internal) dan *parsial* adalah komisaris perusahaan (eksternal). Pihak parsial disini adalah tidak hanya komisaris perusahaan tetapi juga termasuk kreditur, pemerintah dan lainnya.

2.1.5.6 Metode Pendekatan Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:211) secara umum ada tiga pendekatan yang telah dihasilkan para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba yaitu:

1. “Model berbasis aggregate accruals yaitu model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy, DeAngelo, dan Jones. Selanjutnya Dechow, Sloan dan Sweeney mengembangkan model Jones menjadi model Jones yang di modifikasi (modified Jones model). Model-model ini menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan.
2. Model berbasis Specific Accruals yaitu model yang berbasis akrual khusus (specific accruals), yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi. Model ini dikembangkan oleh McNicholas dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beaver dan McNichols.
3. Model berbasis Distribution of Earnings After Management dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev, DeGeorge, Patel dan Zeckhauser serta Myers dan Skinner. Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini terfokus pada pergerakan laba disekitar benchmark yang dipakai”.

2.1.5.7 Penghitungan Manajemen Laba

Perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam mencatat dan menyusun informasi keuangannya. Metode pendeteksian manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Jones Modifikasi (Modified Jones Model) yang di kembangkan oleh Jones (1991).

Menurut Sri Sulistyanto (2008:229) menyatakan bahwa:

“Model Jones Modifikasi (Modified Jones Model) merupakan Model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk

menentukan discretionary accruals ketika discretion melebihi pendapatan. Model ini banyak digunakan dalam penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil yang paling robust“.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi manajemen laba dalam perhitungan *disrectionary accruals* (DTA) menurut Sri Sulistyanto (2008:225) adalah:

1. “ Menghitung nilai total akrual (TA) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (net income) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Dimana:

TAC_{it} = Total Akrual pada tahun t untuk perusahaan i

NI_{it} = Laba bersih (*net income*) pada tahun t untuk perusahaan i

CFO_{it} = Arus kas operasi (*cash flow from operating*) pada tahun t untuk perusahaan i

2. Menghitung nilai current accruals

$$\text{Current Accruals} = D(\text{current assets} - \text{cash}) - D(\text{current liabilities} - \text{current maturity of long term debt})$$

3. Menghitung nilai *nondiscretionary accrual* (NDA).

$$NDAC_{it} = \alpha_1 + \alpha_2$$

Dimana:

$NDAC_{it}$ = *Nondiscretionary current accrual* pada tahun t untuk perusahaan i

α_1 = Estimated intercept pada tahun t untuk perusahaan i

α_2 = Slope pada tahun t untuk perusahaan i

TA_{it-1} = Total Asset pada tahun t untuk perusahaan i

$Sales_{it}$ = Perubahan penjualan pada tahun t untuk perusahaan i

TR_{it} = Perubahan dalam piutang dagang pada tahun t untuk perusahaan i

4. Menghitung nilai *discretionary current accrual* model (DA).

$$\mathbf{DCA_{it} = (TA_{it}/A_{it-1}) - NDAC_{it}}$$

Dimana:

DCA_{it} = *Discretionary Current Accrual* pada periode t untuk perusahaan i

$CurrAcc_{it}$ = *Current Accruals* pada periode t untuk perusahaan i

TA_{it} = *Akrual Aktiva* pada tahun t untuk perusahaan i

$NDAC_{it}$ = *Nondiscretionary Current accrual* pada tahun t untuk perusahaan i

5. Menghitung nilai *nondiscretionary accrual*

$$\mathbf{NDA_{it} = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2}$$

Dimana:

β_0 = *Estimated Intercept* pada tahun t untuk perusahaan i

β_1, β_2 = *Koefisien regresi (slope)* pada tahun t untuk perusahaan i

PPE_{it} : *Aktiva tetap (gross property an equipment)* pada tahun t untuk perusahaan i

6. Menghitung nilai *discretionary accruals, discretionary long-term accruals, dan nondiscretionary long-term accruals*

$$\mathbf{DCA_{PT} = (TAC_{PT}/Sales_{PT}) - (TAC_{PD}/Sales_{PD})}$$

Dimana:

PT = *Periode Tes*

PD = *Periode Dasar.*”

Berikut ini penilaian *discretionary accrual*, diantaranya adalah:

- Jika DA bernilai positif (+), maka perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan laba perusahaan (*income increasing*).
- Jika Da bernilai negatif (-), maka perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba perusahaan (*income decreasing*).
- Jika Da bernilai nol (0), maka perusahaan melakukan cara perataan laba (*income smoothing*), atau perusahaan tidak melakukan manajemen laba.

2.1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen laba, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL
1.	Yana Ulfa (2013)	Pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap Praktik Manajemen Laba.	Menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
2.	Subagyo (2011)	Pengaruh Discretionary Accrual dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	Beban pajak tanggungan tahun 2007 berpengaruh negative terhadap manajemen laba, discretionary accrual pada tahun 2008 berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, beban pajak tanggungan dan discretionary accrual pada tahun 2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
3.	Dewi & Feni (2012)	Pengaruh aset pajak tangguhan, diskresioner akrual, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada	Penelitian tersebut membuktikan bahwa aset pajak tangguhan, discretionary accrual, dan tingkat hutang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

		perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	terhadap manajemen laba. Hanya ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
4.	Felicia & Meiriska (2015)	Analisis pengaruh pajak kini, beban pajak tangguhan, dan basis akrual terhadap manajemen laba	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmi (2013) yang menarik kesimpulan bahwa beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendeteksi manajemen laba.
5.	Suranggane (2007)	Analisis aktiva pajak tangguhan akrual sebagai prediktor manajemen laba.	Akrual memiliki hubungan positif terhadap manajemen laba, Aktiva pajak tangguhan memiliki hubungan negatif terhadap manajemen laba.
6.	Yulianti (2005)	Kemampuan beban pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba	Beban pajak tangguhan berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba.
7.	Budiman (2013)	Pengaruh beban pajak tangguhan dan akrual terhadap manajemen laba)Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap adanya indikasi praktik manajemen laba, akrual berpengaruh terhadap adanya indikasi praktik manajemen laba.

2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan sumber informasi bagi investor dan kreditur, yang menunjukkan kinerja perusahaan untuk dijadikan pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan mereka. Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah informasi mengenai laba. Informasi mengenai laba merupakan unsur penting yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan, baik pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Pentingnya informasi mengenai laba disadari oleh manajemen, sehingga manajemen cenderung melakukan disfunctional behavior (perilaku tidak semestinya) yang mendorong untuk melakukan manajemen laba atau manipulasi laba (Assih dan Gundono, 2000).

Penjelasan konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan yang menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang berbeda sering menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham/pemilik (principal) dengan manajemen (agent), hal ini dikarenakan manajemen terkadang menyalahgunakan kepercayaan dari pemilik untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, yang mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Arif, 2015)

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu beban pajak tangguhan terhadap variabel dependen, yaitu manajemen laba untuk menghindari pelaporan penurunan laba dan manajemen laba untuk menghindari pajak yang harus dibayar dalam jumlah yang tinggi serta menghindari dari pelaporan kerugian yang dapat menurunkan minat investor.

Dalam hal ini, terdapat suatu indikasi manajemen melakukan manajemen laba yang akan diuraikan sebagai berikut :

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat dari perbedaan temporer antara laba komersial dengan laba fiskal. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di periode mendatang akan diakui sebagai beban pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui beban pajak tangguhan. Hal ini berarti bahwa kenaikan beban pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang akan menaikkan nilai laba suatu perusahaan. Beban pajak tangguhan muncul dari komponen-komponen yang bersifat akrual dimana manajer dapat menentukan besarnya nilai perusahaan dari nilai komponen tersebut. Pihak manajemen dalam mengatur komponen-komponen penyebab terjadinya perbedaan temporer yang merupakan pembentuk beban pajak tangguhan dalam manajemen laba sehingga menghasilkan laba yang diharapkan.

Menurut Phillips et al (2003) dalam Sumomba dan Hutomo (2012) menyatakan bahwa hubungan antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba adalah:

“ tindakan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya mengindikasikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba pada laporan keuangan komersial. “... semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan.”

Menurut Scott (2000:361) dalam Aristanti dan Cyntia (2012:329) menyatakan bahwa hubungan antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba adalah:

“perpajakan dapat menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil *taxable income* dalam rangka mengurangi pajak adalah dengan menggunakan metode akuntansi dalam perhitungan nilai persediaan, depresiasi dan cadangan-cadangan yang diperbolehkan.”

Menurut Plesko (2002) dalam Phillips et al (2003) menyatakan bahwa hubungan antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba adalah:

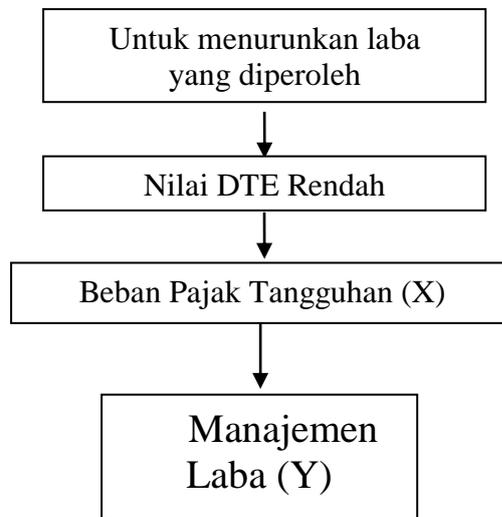
“... jika semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi, maka menunjukkan semakin besarnya direksi manajemen yang terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan.”

Hubungan antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba Menurut Waluyo (2012:273) menyatakan bahwa:

“pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan”.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Kerangka pemikiran ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:93) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum ada jawaban empirik.

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka peneliti mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh Beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.